

PENGEMBALIAN ASET NEGARA YANG DICURI SEBAGAI HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI HUKUM PIDANA INDONESIA

Oleh

Ayu Puspita Sari Situmeang

NIM 1614101059

Program Studi Ilmu Hukum

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan menganalisa pengembalian aset negara hasil tindak pidana korupsi di Indonesia serta (2) menganalisis pengaruh pengembalian aset oleh tersangka terhadap proses hukum bagi pelaku tindak pidana korupsi. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif, pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan bahan hukum menggunakan analisis logika deduktif, dan dibahas secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan (1) Pengaturan hukum terkait pengembalian aset negara hasil tindak pidana korupsi yaitu UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 (UU Tipikor) menetapkan kebijakan bahwa kerugian keuangan negara itu harus dikembalikan atau diganti oleh pelaku tindak pidana korupsi. Surat Edaran bersifat tidak mengikat secara umum berdasarkan hukum positif karena Surat Edaran tidak diciptakan sebagai Peraturan Perundang-Undangan dan pembuat Surat Edaran tersebut bukan dari kewenangan legislatif. UU tipikor adalah hukum khusus dan merupakan payung hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi sedangkan Surat Edaran No.B-1113/F/FD.1/05/2010 merupakan suatu kebijakan. (2) Pengembalian aset oleh pelaku tindak pidana korupsi yang sudah mengembalikan keuangan negara dalam tahap penyelidikan dibebaskan. Tetapi lain hal jika pengembalian keuangan negara dilakukan oleh para koruptor pada tahap penyidikan maka pengembalian tersebut hanya merupakan salah satu faktor meringankan sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 Undang-Undang Tipikor.

Kata kunci: Korupsi, Aset Negara, Hukum Pidana Indonesia.

**RETURN OF STATE ASSETS STOLEN AS A RESULT OF CORRUPTION
CRIMINAL REVIEWING FROM INDONESIA'S CRIMINAL LAW**

By

Ayu Puspita Sari Situmeang

NIM 1614101059

Law Studies Program

ABSTRACT

This study aims to (1) determine and analyze the return of state assets resulting from criminal acts of corruption in Indonesia and (2) analyze the effect of asset returns by suspects on the legal process for perpetrators of corruption. The type of research used is normative legal research, the approach in this study is the law approach (statue approach) and conceptual approach, the source of legal materials used are primary, secondary, and tertiary legal materials. The collection of legal materials uses deductive logic analysis, and is discussed descriptively. The results showed (1) Legal arrangements related to the return of state assets resulting from criminal acts of corruption, namely Law no. 31 of 1999 in conjunction with Law No. 20 of 2001 (Corruption Act) stipulates a policy that state financial losses must be returned or replaced by corruptors. Circular Letters are generally not binding based on positive law because Circular Letters are not created as Legislation and the author of the Circular is not from legislative authority. The Corruption Act is a special law and is a legal umbrella in the eradication of corruption, while Circular No.B-1113 / F / FD.1 / 05/2010 is a policy. (2) Return of assets by a criminal offender who has returned state finances in the investigation stage is released. But it is different if the return of state finances is carried out by corruptors at the investigation stage, the return is only one of the mitigating factors as stipulated in Article 4 of the Anti-Corruption Law.

Keywords: Corruption, State Assets, Indonesian Criminal Law.